

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Sekar, 2016). Menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 terdapat 14 kriteria kemiskinan, dan jika 9 variabel dari 14 kriteria terpenuhi maka suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga miskin (Mardiane, 2020)

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama pemerintah dalam menyusun dan meningkatkan pembangunan yang harus dituntaskan. Dapat diketahui bahwa dampak kemiskinan merupakan sesuatu yang sangat mengerikan. Padahal, angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi. Di tahun 2011, perbandingan antara keluarga miskin dengan jumlah penduduk di Indonesia mencapai 16,58 %. Jumlah ini memang sudah berhasil diturunkan menjadi 11,37% pada tahun 2014 (Septilia & Styawati, 2020)

Pemerintah sudah mengupayakan untuk mengatasi kemiskinan dengan menyalurkan bantuan sosial dana pemerintah. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (Diana & Seprina, 2019).

Bantuan sosial ini diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial dan pelayanan dasar. Masalah dalam pemberian dana bantuan adalah adanya keterbatasan dana yang akan disalurkan sementara itu terjadi

kemiripan data keadaan ekonomi penerima dana bantuan sehingga perlu mengklasifikasikan data penerima bantuan. Dengan status/tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak begitu jelas, membuat bantuan dana pemerintah yang ada cenderung tidak tepat sasaran. Keadaan ini menyebabkan masyarakat yang lebih pantas menerima dana bantuan tidak mendapatkan haknya sebagaimana seharusnya.

Secara umum permasalahan yang terjadi pada penyaluran dana bantuan ini yaitu belum adanya system yang mendukung, sehingga proses pemilihan hanya menggunakan pikiran saja dan belum adanya perhitungan yang tepat pada saat pemilihannya. Sebagai contoh pada kantor wali nagari Dilam pendataan masyarakat masih manual, begitu juga dengan klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga sedikit atau banyaknya warga terkadang protes karena warga yang seharusnya mendapatkan bantuan dana tetapi mereka tidak mendapatkan bantuan dana tersebut, begitupun sebaliknya. Untuk itu dibutuhkan sebuah system yang dapat menunjang keputusan.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah sistem yang berbasis komputer yang menggabungkan model dan data dalam upaya memecahkan masalah tidak terstruktur dengan keterlibatan pengguna melalui antar muka pengguna yang mudah digunakan. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang semiterstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, dimana tak seorangpun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat (Suryeni, dkk, 2015). Metode logika fuzzy merupakan suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Metode ini juga merupakan salah satu dari sekian metode pemecah masalah yang dapat menghasilkan suatu keputusan yang mendekati keakuratan data yang sebenarnya (Sekar, 2016)

Dengan adanya system pendukung keputusan (SPK) menggunakan logika fuzzy bertujuan untuk melakukan pengambilan keputusan dengan lebih cepat dan akurat. Dengan adanya kemampuan system dalam pengambilan keputusan sesuai dengan metode yang dirancang maka diharapkan proses penyeleksian menjadi lebih cepat dan tepat. Dengan perancangan system penunjang keputusan untuk

mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat ini dapat membantu dalam memutuskan penerima bantuan dana pemerintah yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis berkeinginan merancang sistem informasi penunjang keputusan dengan menuangkannya dalam sebuah tugas akhir dengan judul : **“PENERAPAN LOGIKA FUZZY UNTUK MENGLASIFIKASIKAN TINGKAT KESEJATERAAN KELUARGA SEBAGAI ACUAN PENERIMAAN BANTUAN DANA PEMERINTAH”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka teridentifikasi beberapa masalah antara lain :

1. Bagaimana merancang suatu sistem pendukung keputusan untuk mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan logika Fuzzy Berbasis Web?
2. Bagaimana dengan sistem informasi yang dirancang dapat memberikan kemudahan dalam menentukan keputusan penerima bantuan dana pemerintah ?

1.3 Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penulis memuat suatu hipotesa yaitu:

1. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan khususnya pegawai yang berada di bidang penyaluran bantuan dana pemerintah dapat dengan mudah menyalurkan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan klasifikasi yang telah di tentukan.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka batasan masalah antara lain :

1. Sistem pendukung keputusan ini hanya untuk mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai acuan penerimaan bantuan dana pemerintah.
2. Sistem pendukung keputusan ini menggunakan logika Fuzzy dengan bahasa pemograman PHP dengan database MySQL

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari perancangan sistem penunjang keputusan ini adalah :

1. Merancang serta membangun aplikasi sistem penunjang keputusan untuk mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai acuan penerimaan bantuan dana pemerintah.
2. Untuk membantu dalam pengambilan keputusan penerimaan bantuan dana pemerintah.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan keuntungan yang akan dihasilkan oleh rancangan sistem informasi ini adalah:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk membantu masyarakat, khususnya pegawai dalam menentukan penerimaan bantuan dana pemerintah
2. Penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan kualitas penentuan penerimaan bantuan dana pemerintah yang lebih adil.

1.7 Tinjauan Umum

Tinjauan umum merupakan sebuah gambaran umum yang meliputi beberapa cakupan seperti sejarah berdirinya dan struktur organisasi. Disini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum yang meliputi sejarah dan struktur organisasi.

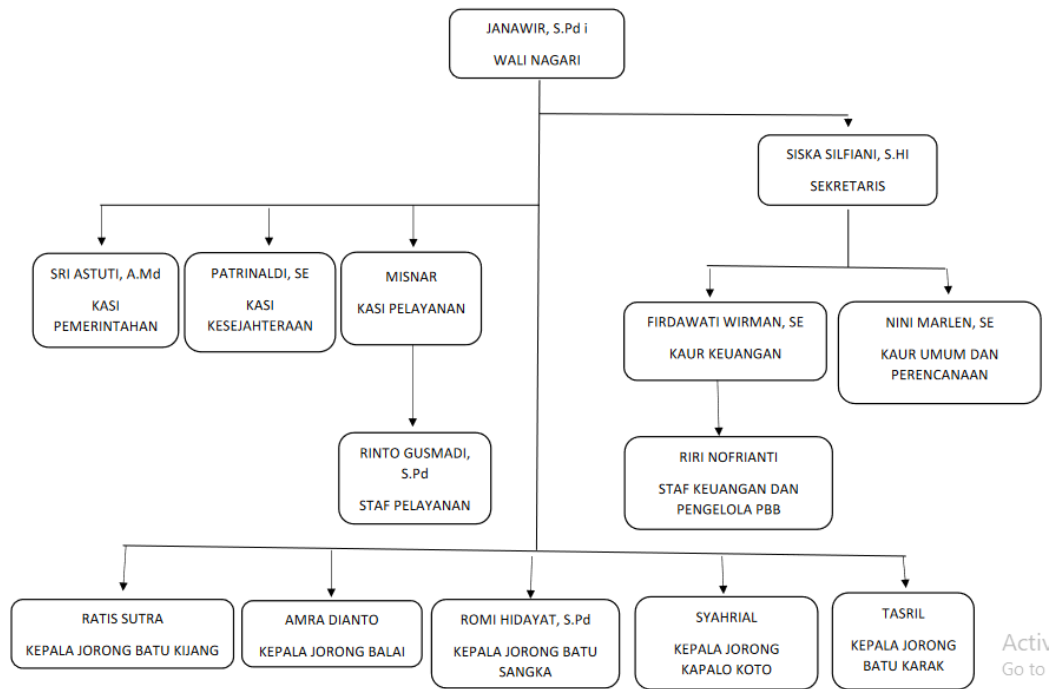
1.7.1 Sejarah Objek Penelitian

Dilam adalah sebuah Nagari di Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, di Provinsi Sumatera barat. Nagari Dilam terdiri dari 5 jorong yaitu, jorong Batu Karak, Jorong Batu Sangka, Jorong Balai, Jorong Kapalo Koto dan Jorong Batu Kijang.

1.7.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, agar setiap orang yang ada dalam satu organisasi tersebut mengetahui pekerjaan yang harus dilakukan dan kepada siapa harus bertanggung jawab, serta mengetahui siapa atasan dan siapa bawahan. Hubungan harus jelas dan dapat diketahui sampai dimana batas dan tanggung jawab dari pekerjaannya yang di jelaskan dalam bentuk struktur organisasi.

Adapun struktur organisasi pada Kantor Wali Nagari Dilam, keca. Bukit Sundi, Kab. Solok dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Dilam

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diuraikan tugas-yugas dari setiap bagian pada struktur organisasi Kantor Wali Nagari Dilam.

1. Wali Nagari
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bersama BPD
 - b. Mengajukan rancangan peraturan nagari
 - c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan Bersama BPD
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagaru mengenai APB nagari untuk dibahas dan ditetapkan Bersama BPD
 - e. Membina kehidupan masyarakat Nagari
 - f. Membina ekonomi Nagari
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif

2. Sekretaris Nagari
Membantu Wali Nagari dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi nagari, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
3. Kaur Umum dan Perencanaan
Membantu Sekretaris Nagari dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan Nagari, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan
4. Kaur Keuangan
Membantu Sekretaris Nagari dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Nagari, pengelolaan administrasi Keuangan Nagari dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Nagari
5. Kepala Jorong
 - a. Membantu pelaksanaan tugas Wali Nagari dalam wilayah kerjanya
 - b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
 - c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
 - d. Membantu wali nagari dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan diwilayah kerja
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Nagari
6. Badan Musyawarah Nagari
 - a. Membahas rancangan peraturan Nagari Bersama Wali Nagari
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Nagari dan peraturan Wali Nagari
 - c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari

- d. Membentuk panitia pemilihan Wali Nagari
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Meyusun tata tertib BPD